



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
**UNIT KERJA** : ANGGOTA KASN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RUDIARTO SUMARWONO
2. Jabatan : ANGGOTA KASN BIDANG MONITORING DAN EVALUASI
3. NHK : 757582

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 8.510.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.050.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/40 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
8. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 234.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 250.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	635.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	20.000.000
Sub Total	Rp.	9.649.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.649.000.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.